

PENGARUH UTANG LUAR NEGERI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA

Asni
asninanugra77@gmail.com
Universitas Lamappapoleonro

ABSTRAK

Utang luar negeri merupakan salah satu dana eksternal yang dipergunakan oleh negaraberkembang dalam melaksanakan pembangunannya guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi di negaranya. Dengan adanya utang luar negeri maka pertumbuhan ekonomi suatu negara lebih mudah tercapai dibandingkan ketika tidak menggunakan dana eksternal seperti utang luar negeri. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang dalam melaksanakan pembangunannya menggunakan utang luar negeri sebagai sokongan dana dalam memenuhi kekurangan dana dari dalam negeri. Untuk menutupi keterbatasan modal tersebut maka perlu ada tambahan modal dari negara yang sudah maju atau lembaga internasional dalam bentuk utang luar negeri (Ayadi, 2018). Indonesia mulai melakukan utang luar negeri sejak masa orde lama dengan menambah sokongan dana untuk melunasi kekurangan dana pembangunan yang tidak bisa dipenuhi di dalam negeri. Berdasarkan sejarah utang luar negeri bermulaketika dibentuknya Inter Govermental Group on Indonesia atau dikenal dengan (IGGI) dimana lembaga ini sebagai konsorsium negara negara kreditur kepada Indonesia. Seiring dengan waktu IGGI dibubarkan pada tahun 1992 karena tragedi di Deli yang membuat pemerintah Belanda tidak lagi memberikan bantuan ke Indonesia menyusul Jerman dan negara lainnya. Karena pemerintah Indonesia menganggap Intergovermental Group on Indonesia atau dikenal dengan istilah IGGI sudah bernuansa politis maka pemerintah memutuskan untuk tidak lagi bergabung di IGGI. Kemudian pada tahun yang sama yakni tahun 1992 dibentuklah Consultative Group on Indonesia atau (CGI) sebagai konsoursium negara negara kreditur sebagai kelanjutan dari IGGI. Namun pemerintah SBY membubarkan CGI karena menganggap Indonesia sudah mampu mengolah keuangan negaranya sehingga dibubarkan CGI pada tahun 2007. Utang luar negeri diperlukan untuk memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan ekonomi dan peningkatan tabungan domestik.

Kata Kunci: Utang Luar Negeri, Sumber Daya Modal.

ABSTRACT

Foreign debt is one of the external funds used by developing countries in carrying out their development in order to realize economic growth in their country. With foreign debt, a country's economic growth is easier to achieve compared to when it does not use external funds such as foreign debt. Indonesia is one of the developing countries which in carrying out its development uses foreign debt as financial support to meet the lack of domestic funds. To cover these capital limitations, additional capital is needed from developed countries or international institutions in the form of foreign debt (Ayadi, 2018). Indonesia began to incur foreign debt since the old order era by increasing financial support to pay off the shortfall in development funds that could not be met domestically. Based on the history of foreign debt, it began when the Inter Governmental Group on Indonesia or known as (IGGI) was formed where this institution was a consortium of creditor countries to Indonesia. Over time, IGGI was disbanded in 1992 due to the tragedy in Deli which caused the Dutch government to no longer provide assistance to Indonesia following Germany and other countries. Because the Indonesian government considered the Inter Governmental Group on Indonesia or known as IGGI to have political nuances, the government decided to no longer join IGGI. Then in the same year, namely 1992, the Consultative Group on Indonesia or (CGI) was formed as a consortium of creditor countries as a continuation of IGGI. However, the SBY government disbanded CGI because it considered Indonesia to be able to manage its country's finances so that CGI was disbanded in 2007. Foreign debt is needed to provide a positive impact on economic development and increase domestic savings.

Keywords: *Eksternal Debt, Resources.*

PENDAHULUAN

Meskipun pemerintah selalu melakukan penambahan utang luar negeri, namun dalam peruntukan dan pengelolaanya tetap berpegang teguh pada undang undang, best practices dan prinsip prudent. Hal penting yang juga perlu dipahami, bahwa utang tersebut digunakan dalam rangka mendukung pembangunan nasional, disepakati bersama antara Pemerintah dan DPR RI ketika membahas dan menetapkan APBN. Penggunaan utang luar negeri diatur dalam undang undang nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara, yaitu pasal 23 ayat (1) yang berbunyi pemerintah pusat dapat menerima dan memberikan hibah atau pinjaman dari pemerintah atau lembaga asing dengan persetujuan DPR dan pasal 12 ayat (1) yaitu defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3% dari PDB dan jumlah pinjaman di batasi maksimal 60% dari PDB. Menurut (Chung & Turnovsky, 2010) utang luar negeri suatu negara tergantung besarnya perubahan perubahan di dalam negeri, utang awal dan lamanya kontrak utang Pinjaman luar negeri yang diperuntukkan untuk pembangunan jangka panjang di sektor sektor yang produktif akan mendorong sektor riil (barang dan jasa) yang akan menggerakkan roda perekonomian. Namun disisi lain utang luar negeri bisa menjadi polemik yang tak berkesudahan jika utang luar negeri salah sasaran, (Didu, 2017) dan serta (Ispriyahadi dkk, 2012).

Utang luar negeri di Indonesia yang disajikan dalam penelitian ini adalah Utang luar negeri pemerintah, bank sentral dan swasta. Utang luar negeri bank sentral adalah utang yang dimiliki oleh Bank Indonesia, yang diperuntukkan dalam rangka mendukung neraca pembayaran dan cadangan devisa. Selain itu juga terdapat utang kepada pihak bukan penduduk yang telah menempatkan dananya pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan utang dalam bentuk kas dan simpanan serta kewajiban lainnya kepada bukan penduduk. Utang luar negeri swasta adalah utang luar negeri penduduk kepada bukan penduduk dalam valuta asing dan atau rupiah berdasarkan perjanjian utang

(loan agreement) atau perjanjian lainnya, kas dan simpanan milik bukan penduduk, dan kewajiban lainnya kepada bukan penduduk. Utang luar negeri swasta meliputi utang bank dan bukan bank. Utang luar negeri bukan bank terdiri dari utang luar negeri Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dan perusahaan bukan lembaga keuangan termasuk perorangan kepada pihak bukan penduduk. Termasuk dalam komponen utang luar negeri swasta adalah utang luar negeri yang berasal dari penerbitan surat berharga di dalam negeri yang dimiliki oleh bukan penduduk (Bank Indonesia,2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

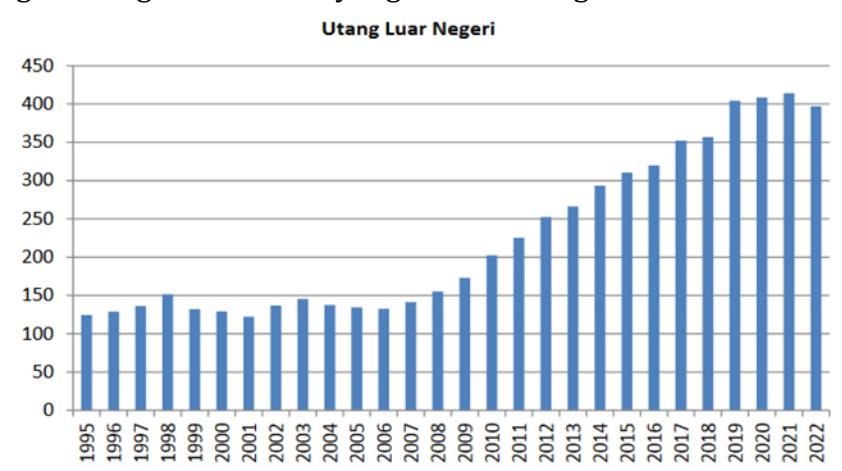
Utang Luar Negeri Sebagai Sumber Pembiayaan Nasional

Teori Harrod-Domar menguraikan bagaimana pemanfaatan bantuan dari luar negeri guna membiayai pembangunan. Pada penerapannya, kelangkaan modal diatasi dengan mendatangkan pinjaman dari luar negeri sehingga terjadilah pertumbuhan ekonomi. Dalam teorinya, tambahan stok modal diperlukan untuk menumbuhkan suatu perekonomian. Teori Three Gap Model menyatakan bahwa timbulnya utang luar negeri dapat disebabkan antara lain: (1) biaya investasi dalam negeri lebih besar dibandingkan tabungan nasional ($I > S$); (2) nilai ekspor lebih kecil daripada nilai impor ($X < M$); (3) pengeluaran pemerintah yang lebih besar dibandingkan penerimaan pajak ($G > T$). Utang luar negeri dapat menjadi sumber pembiayaan yang produktif yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.Selain itu pembangunan yang dibiayai dengan utang

luar negeri dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing ekonomi. Disamping itu utang luar negeri dapat digunakan untuk membiayai defisit anggaran pemerintah, terutama untuk proyek pembangunan infrastruktur dan dapat membantu mengembangkan pasar keuangan domestik dan meningkatkan integrasi ekonomi global. (Jhingan, 2000: 230) Utang luar negeri menjadi salah satu persoalan utama dalam perekonomian Indonesia, beban utang yang menumpuk dan menjadikan Indonesia masuk dalam perangkap utang luar negeri (debt trap) dimana pembayaran cicilan dan bungautang ditutup kembali dengan utang baru. Hal inilah yang membuat kekurangan pembiayaan pemerintah dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang selalu ditutup dengan utang luar negeri. Berkaitan dengan agresifnya pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah saat ini dengan menjadikan utang luar negeri sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dalam menentukan keberhasilan pembangunan dan digunakan sebagai ukuran atas perkembangan atau kemajuan perekonomian suatu negara. Pemerintah Indonesia dalam menyikapi ketergantungan akan utang luar negeri, karena utang luar negeri dianggap sebagai solusi dalam mengatasi kekurangan modal di dalam negeri, sehingga dana yang dipinjam harus dialokasikan dengan baik untuk pengeluaran yang produktif

Perkembangan Utang Luar Negeri Pemerintah Indonesia

Utang luar negeri indonesia yang terus meningkat dari tahun ke tahun .



Sumber : Biro Pusat Statistik

Utang Luar Negeri Indonesia Tahun 1995 – 2022 Berdasarkan data Bank indonesia (BI) bahwa jumlah utang luar negeri Indonesia setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, pada tahun 1995 utang luar negeri Indonesia sebesar 124,3 Milyar US\$. Pada tahun 1996 utang luar negeri Indonesia tumbuh menjadi 128,9 Milyar US\$. Sementara pada tahun 1997 dimana terjadi gejolak politik didalam negeri dan mengakibatkan utang membengkak sebesar 136,3 Milyar US\$ dan puncaknya pada tahun 1998 terjadi krisis moneter yang melanda hampir seluruh negara di dunia dan utang luat negeri Indonesia mengalami pembengkakan sebesar 151,5 Milyar US\$ Situasi yang tidak kondusif pada masa itu membuat berbagai permasalahan dibidang ekonomi seperti menurunnya daya beli masyarakat, tingginya kemiskinan, meningkatnya pengangguran dan menurunnya kepercayaan rakyat terhadap perbankan, Dalam mengatasi hal tersebut pemerintah melakukan kebijakan seperti: melakukan kebijakan pinjaman utang luar negeri. restrukrisasi rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN dan Unit Pengelola Aset Negara. Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah, melakukan independens Bank Indonesia agar lebih fokus mengurus perekonomian,

menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri, mengesahkan UU NO 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Mengesahkan UU NO 8 tentang perlindungan konsumen. Berbagai kebijakan tersebut mampu menurunkan utang luar negeri pada tahun 1999 sebesar 132,2 Milyar US\$.

Pada tahun 2000 utang luar negeri mengalami penurunan sebesar 129,3 Milyar US\$ dan pada tahun 2001 utang luar negeri turun sebesar 122,3 Milyar US\$. Hal ini tidak lepas dari kebijakan Gus Dur yang menolak austerity policy {pengetatan anggaran} sebaliknya Gus Dur menggunakan growth story (strategi pertumbuhan), hasil dari kebijakan Gus Dur tersebut, sektor sektor sektor ekonomi mengalami peningkatan. Selain growth story, tim ekonomi Gus Dur menerapkan strategi optimum debt management, selain itu pada pemerintah Gus Dur, Indonesia banyak menerima dana hibah yang besar yang besar sehingga pada akhir masa jabatannya utang pemerintah indonesia turun menjadi 122,3 Milyar US\$.

Pada tahun 2002 utang luar negeri pemerintah Indonesia naik sebesar 136,9 US\$ meskipun demikian pemerintahan megawati soekarno putri tetap melakukan langkah langkah dalam mengatasi utang luar negeri permerintah indonesia. Adapun langkah tersebut adalah membayar utang secara bertahap, mencari pinjaman dari negara sahabat, mengeluarkan kebijakan privatisasi BUMN menghapus subsidi bahan bakar minyak, mengdongkrak ekonomi rakyat dengan ekonomi kreatif. Dan pada tahun 2003 utang luar negeri pemerintah Indonesia tumbuh sebesar 145,5 Milyar US\$ dan utang luar negeri terus meningkat dan pada tahun 2009 utang luar negeri sebesar 172,9 Milyar US\$

Dan pada tahun 2010 pemerintah Indonesia melakukan banyak pembangunan sehingga utang luar negeri mencapai 202,4 miliar US\$. Pada tahun 2014 pemerintah melakukan kebijakan penambahan utang yang lebih banyak sebesar 293,3 miliar US\$ guna mempercepat pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia dan peningkatan utang luar negeri terus meningkat sampai pada tahun 2015 sebesar 310,7 Milyar US\$. Pada tahun 2016 tersebut pemerintah membuat pembangunan lebih banyak lagi. Akibatnya perekonomian yang belum stabil sepenuhnya membuat pemerintah harus mengambil pinjaman keluar negeri lebih banyak lagi. Mengalami kenaikan kembali pada tahun 2017 yaitu sebesar 10,14 persen, kemudian pada tahun 2018 naik sebesar 6,51 persen dan pada tahun 2019 naik sebesar 404,3 Milyar US\$.

Pada tahun 2020 naik 1,17 persen yaitu sebesar 408,5 Milyar US\$. Salah satu pemicu kenaikan utang luar negeri pada tahun 2020 tersebut adalah karena dampak dari adanya Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19) yang menyebabkan krisis ekonomi dan pemulihan kondisi perekonomian pasca COVID-19). Pada tahun 2021 dan tahun 2022 utang luar negeri Indonesia terus mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya hal ini dikarenakan defisit anggaran dikarenakan penanganan covid 19.

Dampak Utang Luar Negeri Terhadap Pembangunan Nasional

Dengan adanya utang negara ini diantaranya: menutupi defisit anggaran. Menutupi kekurangan kas atas kebutuhan kas jangka pendek dalam pelaksanaan belanja yang tidak dapat ditunda. Sebagai solusi dalam penataan portofolio utang pemerintah yang tentu dimaksud untuk mengurangi beban belanja untuk membiayai utang dalam APBN di tahun-tahun berikutnya. Dari fungsi-fungsi tersebut, dapat disimpulkan bahwa utang merupakan cara untuk menyelesaikan masalah tanpa menyebabkan permasalahan baru. Namun pendefinisian ini baru bisa dibenarkan bila utang dapat dikelola dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Utang luar negeri di Indonesia yang disajikan dalam publikasi ini adalah ULN

pemerintah, bank sentral dan swasta. Utang luar negeri pemerintah adalah utang yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Utang luar negeri bank sentral adalah utang yang dimiliki oleh Bank Indonesia, yang diperuntukkan dalam rangka mendukung neraca pembayaran dan cadangan devisa. Selain itu juga terdapat utang kepada pihak bukan penduduk yang telah menempatkan dananya pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan utang dalam bentuk kas dan simpanan serta kewajiban lainnya kepada bukan penduduk. Utang luar negeri swasta adalah utang luar negeri penduduk kepada bukan penduduk dalam valuta asing dan atau rupiah berdasarkan perjanjian utang (loan agreement) atau perjanjian lainnya, kas dan simpanan milik bukan penduduk, dan kewajiban lainnya kepada bukan penduduk. Utang luar negeri swasta meliputi utang bank dan bukan bank. Utang luar negeri bukan bank terdiri dari utang luar negeri Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dan perusahaan bukan lembaga keuangan termasuk perorangan kepada pihak bukan penduduk. Termasuk dalam komponen utang luar negeri swasta adalah utang luar negeri yang berasal dari penerbitan surat berharga di dalam negeri yang dimiliki oleh bukan penduduk (Bank Indonesia,2011). Utang luar negeri merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang sangat signifikan bagi negara berkembang.

Namun demikian, hasil studi tentang dampak utang terhadap pembangunan ekonomi menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Beberapa ilmuwan memperoleh kesimpulan bahwa utang luar negeri justru telah menimbulkan perlambatan pertumbuhan ekonomi bagi negara-negara pengutang besar, sementara studi lain menyimpulkan sebaliknya- yaitu utang luar negeri menjadi salah satu faktor yang secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi negara-negara pengutang . Menurut teori Harrod Domar, utang luar negeri di negara berkembang disebabkan oleh ketidakcukupan tabungan domestik untuk membiayai pembangunan. Penjelasannya sebagai berikut, angka pertumbuhan (growth), diperoleh dengan membagi tabungan domestik (saving), dengan rasio output kapital. Apabila tabungan domestik tidak mencukupi, untuk mengejar proyeksi angka pertumbuhan tinggi, diperlukan utang luar negeri.

Teori yang dikembangkan oleh Sir Roy Harrod (Inggris) dan kemudian dikenal dengan teori Harrod-Domar. Teori yang berbicara tentang penggunaan utang luar negeri dalam pembiayaan pembangunan selanjutnya dikembangkan oleh beberapa ekonom seperti Hollis Chenery, Alan Strout, dan lain-lain pada tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an. Pemikiran mereka seperti yang diungkapkan oleh Chenery dan Carter (1973) dapat dikelompokkan ke dalam empat pemikiran mendasar. Pertama, sumber dana eksternal (modal asing) dapat dimanfaatkan oleh negara sedang berkembang sebagai suatu dasar yang signifikan untuk mendorong kenaikan investasi serta pertumbuhan ekonomi. Kedua, untuk menjaga dan mempertahankan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi diperlukan perubahan dan perombakan yang substansial dalam struktur produksi dan perdagangan. Ketiga, modal asing dapat berperan penting mobilisasi sumber dana dan transformasi struktural. Keempat, kebutuhan akan modal asing akan menurun setelah perubahan struktural terjadi. Pemikiran diatas sedemikian kuatnya mempengaruhi proses perencanaan pembangunan di negara-negara sedang berkembang yang semata-mata hanya mengandalkan upaya proses pembangunannya pada sumber-sumber daya domestik.(H. B. Chenery & Strout, 1966),(H. Chenery & Carter, 1973). Fenomena besarnya utang luar negeri Indonesia disebabkan oleh dua hal, pertama faktor internal. Pemerintah Orde Baru pada awal tahun 60-an mengesahkan UU Penanaman Modal pada tahun 1967. UU tersebut berimplikasi terhadap arus modal asing di Indonesia. Pada awal 70-an pemerintah Indonesia seolah-olah mengumumkan

kepada dunia bahwa Indonesia mulai memasuki era market economy sehingga modal asing (termasuk ULN) sangat diharapkan. Akan tetapi, kebiasaan mengharapkan utang luar negeri ini mengakibat ketergantungan terhadap utang luar negeri dan sedikit banyak membunuh kreativitas para ekonom pemerintah untuk mencari sumber-sumber pendanaan dalam negeri. Kedua faktor eksternal Lembaga donor asing memandang Indonesia pada akhir 60-an mengalami masa transisi baik secara ekonomi maupun politik, sehingga membutuhkan bantuan. Dalam perkembangannya, ketika Indonesia mengalami booming ekonomi pada awal dekade 90-an, parak kreditor dengan senang hati memberi pinjaman kepada Indonesia. Hal ini dikarenakan, selain Indonesia termasuk negara yang taat dalam soal pembayaran utang, prospek ekonomi Indonesia yang demikian cerah menambah optimisme para kreditor bahwa pinjaman mereka akan memberikan penghasilan berupa bunga dalam jumlah besar.

Utang luar negeri dapat memacu pertumbuhan ekonomi dengan menutupi kekurangan modal yang ada di dalam negeri, namun peningkatan utang luar negeri yang terus menerus akan mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi dan tergolong dalam debt overhang. Beban utang yang terus melonjak dari tahun ke tahun bisa saja menjadi bomerang bagi pemerintah indonesia, karena utang beserta bunga utang yang selalu meningkat dari tahun ke tahun, dan keuntungan dari investasi dengan utang luar negeri bisa saja mengalami kerugian jika terdapat kesalahan dalam tata kelola sehingga keuntungan dari investasi tidak mampu untuk membayar utang beserta bunganya sehingga dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi. Meskipun di sisi lain beban utang yang besar dapat mengakibatkan debt overhang namun di sisi lain utang dengan tata kelola yang baik dan menjadi sumber modal bagi pembiayaan setiap sektor dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi

KESIMPULAN

Utang luar negeri dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara jika dikelola dengan baik. Menurut penelitian yang pernah dilakukan oleh Sebastian Edwards (1998) Utang luar negeri mampu menaikkan investasi pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi lainnya seperti jalan raya, pelabuhan, dan bandara. Selain itu utang luar negeri dapat menaikkan konsumsi di dalam negeri. Jika utang luar negeri diperuntukkan sesuai dengan peruntukannya maka dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pinjaman luar negeri yang dilakukan setiap tahun demi perkembangan pembangunan yang lebih baik tanpa membebani kas negara atau cadangan devisa dengan dengan cara mengimplementasikan pinjaman luar negeri menuju lebih produktif dalam bentuk investasi pembangunan jangka panjang yang mendorong kemajuan sektor riil (pasar barang dan jasa) karena ini dapat mendorong aktifitas perekonomian domestik menuju kesejahteraan masyarakat dengan tingkat pengembalian yang lebih cepat dan tinggi.

Utang luar negeri mampu meningkatkan investasi asing di Indonesia yang dapat menciptakan lapangan kerja dan transfer teknologi serta dapat menstabilkan nilai rupiah yang dapat menarik investasi asing masuk. Selain itu luar negeri akan menghasilkan keuntungan ekonomi ketika digunakan untuk membiayai proyek proyek yang produktif sehingga utang mampu terbayarkan beserta bunganya.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh (AR, 2012) (Park & Sung, 2020), (Todaro, 1977), (Brass, 2016), (Imp & Resmi, 2018), (Rahayu, 2010), (Hulten et al., 2006), (Ispriyahadi et al., 2012) yang menemukan bahwa untuk meningkatkan kemajuan suatu wilayah maka di perlukan modal dari luar. Tanpa adanya modal dari luar maka

pertumbuhan ekonomi sulit terwujud. Pembangunan berbagai sektor di suatu negara dengan meningkatkan kemajuan di wilayah tersebut memerlukan dana dari luar, khususnya negara dunia ketiga yang masih dalam tahap perkembangan menuju negara maju memerlukan bantuan berupa pinjaman luar negeri.

Hasil temuan ini sejalan dengan yang teori ekonomi pembangunan, the stage of economic growth, dimana diperlukan perubahan dalam mewujudkan kehidupan perekonomian yang modern. Teori ketergantungan dan modernisasi yang mengemukakan tentang pentingnya dana dari luar untuk melakukan pembangunan di dalam negeri. Teori Harrod Domar yang mengemukakan tentang pentingnya akumulasi modal. Modal merupakan faktor penting dalam melakukan pembangunan. Teori Harrod Domar menganggap akumulasi modal sebagai bentuk dalam menutup defisit anggaran di dalam negeri.

Temuan hasil penelitian dari Kanwal, S., R Rasheed, M. I., Pitafi, A. H., Pitafi, A., & Ren, M. (2020) dimana pembangunan memerlukan anggaran yang besar yang bersumber dari utang luar negeri, meskipun menggunakan anggaran yang bersumber dari luar dalam bentuk pinjaman, pemerintah tetap memberikan ruang fiskal untuk pembangunan diberbagai sektor karena sektor ini dianggap mampu meningkatkan sektor lain.

Hasil temuan ini tertuang dalam teori Harrod Domar dimana mengemukakan asumsi bahwa masalah pembangunan pada dasarnya adalah masalah penambahan modal. Masalah keterbelakangan adalah masalah kekurangan modal. Ketika ada modal dan modal diinvestasikan, maka akan tercipta pembangunan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- AR, M. (2012). Bappenas dalam sejarah perencanaan pembangunan Indonesia 1945-2025. Jakarta: LP3ES.
- Brass, J. N. (2016). Development theory. Dalam Handbook on Theories of Governance. <https://doi.org/10.4337/9781784711542.00005>
- Chenery, H. B., & Strout, A. M. (1968). Foreign assistance and economic development: Reply. The American Economic Review.
- Didu, S. (2017). Pengaruh utang luar negeri dan penanaman modal asing (PMA) terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jurnal Ekonomi-Qu <https://doi.org/10.35448/jequ.v7i2.4968>
- Hulten, C. R., Bennathan, E., & Srinivasan, S. (2006). Infrastructure, externalities, and economic development: A study of the Indian manufacturing industry. World Bank Economic Review. <https://doi.org/10.1093/wber/lhj007>
- Ispriyahadi, H., Nuryartono, N., Manurung, A. H., & Hakim, D. B. (2012). Pengaruh utang luar negeri swasta terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Journal of Capital Market and Banking.
- Jhingan, M. T., Xu, H., & Gondje-Dacka, I.-M. (2016). The impact of external debt and foreign direct investment on economic growth: Empirical evidence.